

ABSTRAK

Kota Pekalongan memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, terutama wilayah pesisir yang rawan terhadap bencana banjir dan rob. Indonesia sebagai negara yang rawan bencana memandang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, daerah-daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi diharapkan dapat melaksanakan penanggulangan bencana dengan efektif dan efisien agar pembangunan kota/daerah berjalan lancar. Pekalongan terutama wilayah pesisir membutuhkan penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu. Namun, kota Pekalongan belum memiliki lembaga yang menangani hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen bencana di pesisir Kota Pekalongan dengan metode analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan meliputi kajian terhadap dokumen tertulis, observasi langsung di lokasi penelitian, dan data primer hasil wawancara untuk mendeskripsikan proses manajemen bencana di pada tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan sehingga dapat diketahui keberhasilan manajemen bencana di pesisir kota Pekalongan. Keberhasilan manajemen bencana diukur dari adanya koordinasi, undang-undang kebencanaan dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Manajemen bencana di pesisir Kota Pekalongan masih belum optimal. Peraturan tentang kebencanaan di Kota Pekalongan masih sangat minim, baik peraturan yang mengatur pada tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Pemerintah Kota Pekalongan belum mempunyai rencana tanggap darurat secara tertulis. Prosedur penyelamatan hanya berupa prosedur tetap (protap) yang hanya dipahami oleh petugas yang telah dilatih. Koordinasi yang dilakukan instansi dalam penanggulangan bencana sudah berjalan tetapi masih belum optimal. Ketika terjadi banjir besar, posko bencana yang selama ini bertugas, dipindahkan ke bagian kesra kantor Sekretariat Walikota yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam penanggulangan bencana. Pokmas Darat, dan Tagana dibentuk untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Namun, keberadaan kelompok-kelompok ini belum dikenal masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan manajemen bencana di pesisir Kota Pekalongan perlu dibuat suatu lembaga/instansi yang secara khusus menangani bencana sehingga peraturan-peraturan kebencanaan dapat dilengkapi. Selain itu pelibatan masyarakat secara aktif harus dilaksanakan melalui diklat kebencanaan.

Kata Kunci: Manajemen Bencana, Banjir, Rob